

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Bambang Dwi Baskoro. *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta, 1994.
- _____. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana. Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, 2007.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Friedman, Lawrence M. *History of American Law*. New York: Simon and Schuster, 1973.
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- _____. *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Alumni, 2011.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Neng Yani Nurhayani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Peter M. Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan VI (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- _____. *Membedah Hukum: Suatu Kajian Filosofikal dan Sosiologikal*. Yogyakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- _____. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1986.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Soedarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1977.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Suteki & G. Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2022).

Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime*. New York: Dryden Press. 1949.

Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.

Wana Alamsyah. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2019.

Yanuar Purwaning. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: Alumni, 2015.

B. JURNAL DAN MAKALAH

Atip Latipulhayat, “Due Process of Law”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Darmabrata dan Hertanto, “Jual Beli dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, No. 1, 2017.

Fikriansyah, Riza. “Kematian Hukum dan Lahirnya Hukum Progresif.” *Sol Justicia* Vol. 4, No. 1, 2025

Gunawan, Yopi, dan Rifqi Pratama. “Legitimasi Mantan Narapidana Kasus Korupsi dalam Mencalonkan Diri sebagai Calon Legislatif.” *JCA of LAW* Vol. 3, No. 1, 2022

Hutajulu, T. Erwisnyahbana, dan R. Ramlan, “Kewenangan Kejaksaan dalam Proses Lelang Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana yang Dirampas Negara,” *Jurnal Dharma*, 2025.

Isna Nuraini, K. “Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan terhadap Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Surakarta.” *Verstek: Jurnal Hukum*, 2021.

Ledgerwood, Julie, dan Jesse Carpenter. *A Framework for the Analysis of Market Manipulation*. Tokyo: Japan Exchange Group, 2012.

Mahmud. “Problematisasi Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3, 2018.

Muhammad, Rusli. “Korupsi Sebagai Suatu Bentuk *White Collar Crime*.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 1, 2016.

Pelafu, Fiona L. “Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex Crimen* 6,

no. 3, 2017.

Siburian, Riskyanti Juniver dan Denny Wijaya. “Korupsi dan Birokrasi: *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Upaya Penanggulangan yang Lebih Berdayaguna.” *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 3, no. 1, 2022.

Syahrul, “Kejahatan Keraf Putih dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, 2022,

Wiarti, J., “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara,” *UIR Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 25, 2017.

C. PERATURAN PERUNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Lelang Barang Rampasan yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

D. INTERNET

Ade Ridwan, ICW Catat Sepanjang 2023 ada 791 Kasus Korupsi, Meningkatkan 5 Tahun Terakhir, <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431> diakses pada 14 Mei 2025.

Aryo Putranto, Swasta, ASN Pemda, dan Kades Posisi 3 Teratas Terdakwa Korupsi 2023, <https://metrodaily.jawapos.com/hukumkriminal/2355202081/swasta-asn-dan-kades-paling-banyak-korupsi> diakses pada 10 April 2025.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. *Korupsi: Pengertian, Penyebab, dan Cara Pencegahannya*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-> diakses pada 7 Juli 2025.

Dwi Fitria Astuti, *Pengurusan dan pengelolaan barang Rampasan Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim/bacaartikel/16424/Pengurusan-dan-Pengelolaan-Barang-Rampasan-Negara.html> diakses 6 Juli 2025.

Irfan Kamil, *MA Kabulkan Kasasi Kejagung, Aset WanaArtha Lifa Terkait Kasus Jiwasraya Senilai Rp 2,4 Triliun Dirampas*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/18304951/ma-kabulkan-kasasi-kejagung-aset-wanaartha-life-terkait-jiwasraya-senilai-rp> diakses 10 Juli 2025.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *BPA Kejagung Lelang Saham Perkara Tipikor dan TPPU Jiwasraya Terpidana Benny Tjokrosaputro, Terhimpun Dana Rp37,8 Miliar*, <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/bpa-kejagung-lelang-saham-perkara-tipikor-dan-tppu-jiwasraya-terpidana->

[benny-tjokrosaputro-terhimpun-dana-rp378-miliar-mvk.html](https://www.antarane.ws.com/berita/2112146/kejagung-sita-saham-benny-tjokrosaputro-senilai-rp45-miliar) diakses pada 7 Juli 2025

Laily Rahmawati, *Kejagung sita saham Benny Tjokrosaputro senilai Rp45 Miliar*, <https://www.antarane.ws.com/berita/2112146/kejagung-sita-saham-benny-tjokrosaputro-senilai-rp45-miliar> diakses pada 10 Juli 2025.

M. Januar Rizki, *Tantangan Penerapan Non Conviction Based dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penerapan-non-conviction-based-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana> diakses pada 11 Juli 2025.

Saldi Isra, "Melihat Korupsi dari Perspektif Hak Asasi Manusia," Hukumonline, 15 Mei 2012, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-korupsi-dari-perspektif-ham-lt4fc860a854e33/> diakses pada 7 Agustus 2025.

Shiddiq, Muhammad, *Benny Tjokrosaputro Pinjam Nama Istri dan Keluarga Lainnya untuk Transaksi Saham Jiwasraya*, <https://www.gresnews.com/artikel/118296/Benny-Tjokrosaputro-Pinjam-Nama-Istri-dan-Keluarga-Lainnya-untuk-Transaksi-Saham-Jiwasraya/> diakses pada 10 Juli 2025.

Sholahuddin Al Ayyubi, *Kejagung Lelang Aset Saham Benny Tjokro Senilai Rp37,8 Miliar*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20250322/16/1863709/kejagung-lelang-aset-saham-benny-tjokro-senilai-rp378-miliar> diakses pada 17 Juli 2025

Wana Alamsyah, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2019), diakses dari <https://www.antikorupsi.org/laporan-penindakan-kasus-korupsi-2019> pada 7 Agustus 2025.

Yohana Artha, *Kasus Jiwasraya, Aset Benny Tjokro Dilelang Rp 1,17 Miliar*, <https://money.kompas.com/read/2025/04/28/104221926/kejagung-lelang-aset-sitaan-kasus-jiwasraya-milik-benny-tjokro-senilai-rp-117> diakses pada 17 Juli 2025.

Yuda, Pande Putu dan Tantia Margaret, *Kuliah Bersama Praktisi MM USD: Menelisik Kasus Jiwasraya Dalam Perspektif Etika Bisnis*, <https://web.usd.ac.id/fakultas/ekonomi/daftar.php?id=berita&noid=332> diakses pada 23 Mei 2024.